PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH DI TANAH PAPUA

The Education Development of Madrasah In Papua

Muhamad Murtadlo

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Puat tadho25@gmail.com

Naskah diterima tanggal 10 Februari 2015. Naskah direvisi tanggal 26 Februari 2015. Naskah disetujui tanggal 03 November 2015.

Abstrak

Kehadiran madrasah di Papua sering dituduh sebagai bagian dari Islamisasi. Padahal kehadiran madrasah di daerah itu lebih banyak diperuntukkan untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak para pendatang yang kebanyakan muslim. Penelitian ini ingin mencoba melacak sejarah perkembangan dan dinamika madrasah di tanah papua. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan obyek sasaran seluruh daerah di Papua. Penelitian ini menemukan data bahwa madrasah di Papua sudah ada sejak awal abad 19. Namun perkembangan madrasah sering terputus karena terbatasnya Sumber Daya manusia yang mengembangkannya. Madrasah berkembang secara masif sejak hadir organisasi yayasan pendidikan islam (YAPIS) yang berdiri tahun 1968, sebuah yayasan yang menaungi semua yayasan/organisasi penyelenggara madrasah termasuk NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya madrasah membuka diri untuk melayani siswa non muslim dengan kewajiban menyediakan guru agama sesuai dengan agama murid dan perlunya kementerian agama mengirim guru-guru berkualitas di papua.

Kata kunci: madrasah, Papua, YAPIS

Abstract

The existence of madrasah (Islamic school) in Papua is often accused of being part of Islamization. Actually, madrasah existed for Muslim immigrants particularly children. This research tried to track the history of development and the dynamics of madrasah in Papua. The research was conducted in qualitative method and the entire districts in Papua became the objects. The researcher found that madrasah in Papua was firstly built since in the early 19th century; however the development of madrasah often stopped due to limited human resources. Madrasah in Papua has grown massively since the organization of Islamic educational foundation (YAPIS) was established in 1968, a foundation that houses all of the foundations of madrasah both Nahdatul Ulama and Muhammadiyah. The researcher suggested that madrasah needs to flexibly open to recruit non-Muslim students and simultenously to provide religion teachers based on the students' religion. In addition, The Ministry of Religion sends qualified teachers in Papua.

Keywords: madrasah, Papua, YAPIS

PENDAHULUAN

lekalipun wilayah Papua sampai saat ini masih sering dipenuhi dengan gambaran penuh konflik baik itu konflik antar suku (masa lalu), konflik antara penduduk pribumi dan pendatang, maupun konflik politik antara sebagian orang Papua yang diwakili Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan NKRI, namun masyarakat Papua sepakat membuat motto "Papua Bumi Damai." Sebuah motto impian yang luar biasa yang menjadi dasar untuk mengakhiri semua potensi konflik di daerah ini. Ketika ke Merauke, penulis menemukan salah satu semboyan kabupaten ini: "Izakod Bikai Izakod Kai" (Satu hati satu tujuan), artinya yaitu satu hati untuk sama-sama mencapai kemajuan. Semboyan

itu juga sering diartikan Merauke sebagai istana damai. Semboyan ini menuntut warga untuk mengedepankan kedamaian. Saya melihat relasi masyarakat pendatang dengan putera daerah terlihat saling sapa dan ramah satu sama lain.

Di Papua, kehadiran madrasah sering dituduh sebagai langkah Islamisasi. Padahal kehadiran madrasah di daerah itu lebih banyak diperuntukkan untuk menyediakan pendidikan bagi anakanak para pendatang yang kebanyakan muslim. Dalam rangka memberi pendidikan agama, para pendatang bersepakat untuk mendirikan madrasah untuk putra putri mereka. Jumlah orang lokal yang menempuh studi di madrasah relatif rendah dan bisa dihitung dengan jari. Kekhawatiran madrasah melakukan Islamisasi bisa dikatakan berlebihan, kecuali misalnya madrasah menerima siswa non muslim dan kemudian tidak menyediakan guru agama sesuai agama siswa, maka dalam konteks itu tuduhan Islamisasi mungkin bisa digunakan. Sejauh ini madrasah masih mengkhususkan diri menyediakan layanan pendidikan bagi siswa muslim.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk sebaran madrasah sebagai bentuk ideoscape dalam konteks budaya global. Appadurai (1996) menggambarkan globalisasi sebagai imagined worlds, atau "berbagai macam dunia yang terdiri dari imajinasi orang-orang dari kelompok-kelompok di seluruh dunia yang diletakan secara histories. Appadurai menyebut arus-arus dalam globalisasi dalam sebutan scapes. Appadurai menyebutkan adanya lima arus utama yang berperan penting dalam perbincangan global, yaitu: ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes, dan ideoscapes. Di sini kita hanya akan fokus kepada salah satu scapes di atas, yaitu ideoscapes. Ideoscapes adalah serangkaian imaji yang mempunyai nuansa politik yang berkaitan dengan keberadaan Negara.

Institusi madrasah dalam batas-batas tertentu bisa dikelompokkan dalam kategori ideoscapes, yaitu sebuah kata yang mewakili ide yang terjadi di berbagai tempat di dunia. Simbol madrasah ada di banyak tempat, dan mempunyai konstruksi yang berbeda sesuai dengan konteksnya, namun oleh para penggunanya nama madrasah dijadikan sebagai bahasa untuk mengartikulasikan aktifitsnya. Kajian ini mencoba melacak subyek pengguna dan bentuk-bentuk pemaknaan di balik kata madrasah di berbagai tempat di Indonesia, tidak terkecuali di daratan Papua.

Kehadiran madrasah pertama kali di Papua ada yang menghubungkan dengan kedatangan Habib Muhammad Asghar (kecil) Ulama yang berasal dari Baghdad ke Jayapura (1867). Sayangnya, setelah meninggal pada tahun 1908 dengan disebabkan sakit kolera selama kurang lebih 1 bulan, madrasah yang digagasnya terbengkalai tidak ada yang mengurusnya lagi sampai dengan tahun 1909 awalawalnya masuk tentara Belanda ke kota Jayapura. Belanda banyak membunuh dan memaksa murtad para santri. Habib muhammad kecil kemudian madrasah beliau dan musholah beliau yang berada di situ dibakar hinggá tidak ada lagi sisa-sisa peninggalan Islam di kota Jayapura yang ada hanya kuburan beserta keluarganya yang bisa kita saksikan sendiri di Jalan Sam Ratulangi. http://masjidq. blogspot. com/2009/04/sejarah-masuknya-Islam -di-Jayapura (html akses 31 Agustus 2014).

Saat ini Madrasah di Papua telah menyebar sedemikian rupa di beberapa wilayah di Papua, sekalipun dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan data Kementerian Agama (2010) disebutkan bahwa di Papua (termasuk Papua Barat) terdapat 131 lembaga madrasah yang terdiri dari jenjang MI, MTS dan MA. Untuk jenjang MI dikeseluruhan Papua terdapat 61 MI (10 negeri dan 51 swasta), untuk jenjang MTs terdapat 46 lembaga (5 negeri dan 41 swasta), sedangkan untuk jenjang MA terdapat 24 buah (4 negeri dan 20 swasta). Konsentrasi madrasah paling besar ada di Sorong dan sekitarnya, disusul Jayapura, kemudian Merauke (Analisa berdasarkan EMIS, Kementerian Agama RI, Tahun 2010).

Untuk seluas pulau Papua, jumlah 131 madrasah tentulah jumlah yang sangat kecil. Apalagi jumlah itu dibagi dua, yaitu Papua dan Papua barat. Papua memiliki 72 madrasah yang terdiri dari jenjang MI, MTs dan MA, sedangkan Papua barat memiliki 59 madrasah (MI, MTs dan MA). Untuk penduduk Papua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Papua sebanyak 450.096. orang ini dilayani madrasah sebanyak 72 madrasah. Bandingkan dengan wilayah Nusa tenggara Timur, di mana jumlah muslimnya sebanyak 423.925 orang dilayani madrasah sebanyak 232 madrasah. Ini menunjukkan jumlah yang masih jauh bila dibanding dengan wilayah NTT (BPS tahun 2010 dengan Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun 2009/2010).

Permasalahan penelitian dirumuskan mengetahui bagaimana meningkatkan aksesibilitas masayarakat Papua terhadap kehadiran madrasah. Permasalahan penelitian dirinci dengan pertayaanya berikut: 1) bagaimana sejarah perkembangan madrasah d tanah Papua; 2) siapa pelaku dan penggerak madrasah di tanah Papua; 3) permasalahan apa saja yang dihadapi madrasah di tanah Papua.

METODE PENELITIAN

Untuk memetakan keadaan madrasah di bumi Papua ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi, melacak literatur yang mendukung baik dari buku-buku pustaka maupun data internet, serta berdiskusi dengan beberapa kolega yang pernah mengunjungi papua. Selanjutnya data disusun secara deskriptif disertai dengan konfirmasi dengan data-data yang telah ada.

Untuk pengumpulan data, penulis sempat pergi ke Merauke pada tahun 2012 dan Sorong di Papua barat pada tahun 2013. data lain diperoleh dari catatan perjalanan beberapa teman di badan Litbang kementerian Agama RI yang mengunjungi madrasah di perbatasana negara, tepatnya di Kab Keerom dan Jayapura. Studi pengayaan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pelacakan data tambahan melalui internet.

Melacak jejak sejarah madrasah di tanah Papua tidaklah gampang, karena datanya masih sangat terbatas. Hal ini mewarnai penulisan sejarah madrasah di Papua ini. Dengan berbagai keterbatasan, kajian ini banyak menggunakan datadata dari berbagai sumber yang mungkin diaih seperti literatur dan internet terkait perkembangan pendidikan Islam di Papua. Beberapa lokasi sempat kami kunjungi seperti Merauke, Sorong dan Jayapura. Namun begitu, perkembangan madrasah di Papua menarik dicermati, mengingat kehadiran madrasah di Papua sering dibayangbayangi tuduhan Islamisasi. Padahal kalau mau jujur sebenarnya masuknya Islam di tanah Papua mendahului masuknya Kristen atau Katholik di Papua, bahkan masuknya Kristen di Papua menurut cerita justru diantarkan oleh Muslim yang diantar ke Pulau Mansinam, dekat Manokwari. Tentu saja tuduhan itu tidak pada tempatnya. Pertarungan isu politik terkait dengan isu merdeka menyebabkan sering muncul-muncul rumor yang sebenarnya tidak menguntungkan kedua belak pihak baik Kristen maupun Muslim. Bagi Kristen, dengan dominannya Kristen di tanah Papua menyebabkan Kristen seakan di belakang keinginan Papua Merdeka. Bagi Muslim usaha apapun ketika berhasil diakan sedang melakukan usaha Islamisasi, seperti pada usaha menyelenggarakan pendidikan madrasah.

PEMBAHASAN Sejarah Madrasah di Papua

Sejarah madrasah di Papua ada yang menyebutkan bahwa madrasah di Jayapura pernah didirikan oleh Habib Muhammad kecil (asghar) Ulama yang berasal dari Bagdad (1867). Mungkin yang dimaksud madrasah di sini masih sebatas majlis taklim, mengingat di daerah lain di Indonesia untuk tahun yang sama belum ada umat Islam yang menggagas pendidikan agama bercorak madrasah. Sebagai perbandingan madrasah pertama di Jawa yaitu Madrasah Mamba'ul Ulum di Solo berdiri 1905, Madrasah yang didirikan Abdullah Ahmad di Padang Panjang Sumatera Barat beridiri 1909. Ulama ini diutus oleh kesultanan Turki yang di minta kesediaaannya untuk menyiarkan ajaran Islam di Jayapura atas permintaan kesultanan Tidore mengingat saat itu di Jayapura sudah ada umat Islam yang membutuhkan bimbingan atas informasi dari salah satu Kolano di Sarmi ke pada Sultan Tidore. Jejak yang ada di daerah ini hanyalah makam Habib Muhammad asghar di jalan Sam Ratulangi.

Jejak madrasah berikutnya di Papua muncul pada tahun 1929 di Mopah Merauke. Pendirinya adalah ulama Aceh yang dibuang ke Boven Digul, Papua. Dia dikenal dengan nama Teuku Bujang Salim, yang namanya diabadikan pada masjid terindah kedua di Aceh setelah masjid Baiturahman Aceh. Dia adalah salah satu tokoh-tokoh Nasional yang dibuang ke Boven Digul selain Hatta, Sutan Syahrir, Muchtar Luthfi, Iljas Jakub, Muhammad Kasan dan AA Rasyid). Namun di waktu pembuangannya, dia justru memanfaatkannya untuk merintis perkembangan Islam di Merauke pertama kali. Maka sejak sepak terjang Teuku Bujang Selamat inilah, Islam berkembang di Merauke dibuktikan dengan keberadaan masjid Nurul Huda Merauke.

Teuku Bujang Selamat lahir di Keude Amplah, Nisam, (dulu Nanggroe Nisam), Aceh Utara tahun 1891. Nama aslinya adalah Teuku Rhi Budjang Selamat atau Bujang Salim Bin Rhi Mahmud dikenal sebagai salah seorang perintis pergerakan kemerdekaan Indonesia dari Aceh. Dia adalah Putra seorang Uleebalang di Aceh. Berdasarkan arsip Masjid Besar Bujang Salim, pada 1912 Bujang Salim menyelesaikan pendidikan kelas lima pada Kweekschool van Osvia (sekolah Belanda) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia lalu dipanggil pulang ke Aceh, selama setahun tinggal di Kutaradja (Banda Aceh), mempelajari dan mempraktikkan Tata Kepamongprajaan. Setahun kemudian, Bujang Salim ditunjuk menjabat Zelfbstuurdier Nanggroe

Nisam sampai 1920. Selama menjabat, ia sering beraktivitas di bidang politik dan keagamaan. Itu sebabnya, Belanda kemudian memecat Bujang Salim dan diasingkan ke Meulaboh, 8 Februari 1921

Dari Meulaboh, pada 21 April 1922, ia dibawa sebagai tahanan politik dibuang ke Merauke, Papua. Di sana, Bujang Salim tidak ingin menjadi tahanan politik yang pasif, dia justru memanfaatkan waktu dengan aktivitas pendidikan dan keagamaan. Dia mengawali dakwah Islam di wilayah Merauke. Bujang Salim mengembangkan Islam dalam warna atau tradisi yang dekat dengan Muhammadiyah. Tengku Bujang Salim mempelopori pelaksanaan sholat hari raya di lapangan terbuka, penetapan awal bulan ramadhan dan hari raya berdasarkan tehnik hisab. Dia juga membentuk gerakan kepanduan Hizbul Wathon.

Usaha dakwah Bujang Salim ini akhirnya memperoleh simpati penduduk lokal. Banyak orang yang mulai mengenal Islam dan masuk Islam. Pada tahun 1929, ia dan para pengikutnya mendirikan madrasah pertama di Merauke atau bahkan di tanah Papua. Dia mendirikan pendidiran madrasah di lokasi dekat bandara pesawat udara di Mopah, Merauke. Di tempat yang sama, dia dan beserta pengikutnya mendirikan masjid yang pertama kali di Merauke, yaitu Masjid Nurul Huda.

Berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan Bujang Salim di Merauke ini akhirnya diketahui Belanda. Hal ini dianggap bertentangan dengan arah perpolitikan Belanda ketika itu. Akibatnya, ia ditangkap lagi dan dibuang ke daerah lebih pedalaman lagi, yaitu Tanah Merah, Boven Digoel, Papua (sekitar 450 km ke daerah pedalaman dari Merauke), pada 5 April 1935. Di masa serbuan Jepang, Bujang Salim diungsikan ke hutan Bijan, 11 Mei 1942, kemudian dikembalikan ke Merauke. Pada 3 November 1942, ia dibawa lagi ke Tanah Merah. Kalau dihitung masa hidup Bujang Salim di Papua, praktis masa pembuangan Bujang Salim ke bumi Papua berlangsung kurang lebih 21 tahun. Pembuangan pertama terjadi pada tahun 1922 dan berakhir ketika tahanan politik ini dibawa ke Australia pada tahun 1943. Setelah boalk balik ke berbagai tempat, akhirnya Bujang Salim bisa kembali lagi ke Aceh pada tahun 1950 dan meninggal pada tahun 1959 dan dikebumikan di belakang Masjid Besar Bujang Salim. Krueng Aceh Timur.

Peninggalan rintisan Madrasah di Mopah Merauke ini sekarang kita bisa saksikan dalam bentuk keberadaan masjid Nurul Huda di Merauke, di ujung landasan Bandara Mopah. Saat ini aktifitas keagamaan yang ada di lokasi itu adalah selain ibadah wajib sholat lima waktu, tempat itu juga digunakan untuk belajar membaca Alquan dan untuk penyelenggaraan taman Kanak-kanak.

Perkembangan madrasah di Papua berikutnya terlacak di Jayapura. Saat itu para pedagang dari Ternate, Tidore membangun masjid untuk pertama kalinya di jayapura yaitu ada tahun 1943. Masjid itu bernama masjid Nurul Huda yang beralamatkan di Il Percetakan No. 126 jayapura. Tidak jelas persis madrasah di masjid itu mulai di selenggarakan, namun sebelum organisasi YAPIS (1968) hadir di Jayapura, di masjid Nurul Huda ini telah diselenggarakan pendidikan madrasah.

Perkembangan madrasah mulai berkembang secara masif sejak hadirnya Yayasan pendidikan Islam (YAPIS) pada tahun 1968. Sebelumnya penyelenggaraan pendidikan Islam di Papua berjalan sendiri-sendiri, hal ini tidak begitu disenangi oleh pemerintah daerah. Mereka menginginkan agar pendidikan Islam dikelola melalui satu pintu. Maka dengan kehadiran YAPIS, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam lain bisa dikoordinasikan melalui satu atap.

Kehadiran YAPIS ini tidak terlepas dari kontribusi Anwar Ilmar, seorang birokrat yang berasal dari Sumatera Barat. Ia pernah menjabat menjadi Bupati merauke (1963-1966) dan bupati Jayapura (1967-.). Sejak diangkat menjadi bupati Jayapura, Anwar Ilmar meneruskan gagasan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang digagasnya sejak di Merauke, hanya saja singkatannya menjadi YAPIS. Bermodalkan madrasah yang ada di masjid Nurul Huda, YAPIS menggalang bersama organisasi-organisasi penyelenggara pendidikan Islam seperti NU, Muhammadiyah untuk bersamasama, bahu membahu mengembangkan pendidikan Islam di Papua. Maka sejak itu Madrasah terpayungi oleh organisasi YAPIS ini, sekalipun YAPIS juga membuka sekolah-sekolah umum.

Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) berdiri di Papua pada tanggal 15 Desember 1968. Pendirian YAPIS ini didasarkan keprihatinan perkembangan pendidikan Islam yang lambat di tanah Papua, jauh tertinggal dengan pendidikan Kristen. Maka untuk mengejar ketertinggalan YAPIS dan menyatukan perjuangan di bidang pendidikan Islam antara Muhammadiyah dan NU di Papua. Pendirian YAPIS ini dilakukan oleh Anwar ilmar. Secara embrio, YAPIS bisa dilacak gerak pertamanya di Merauke. Saat itu di Merauke yayasan Al-Ma'arif (NU) mendirikan SD Islam sedang Muhammadiyah mendirikan Pendidikan Guru Agama Islam

(PGA). Namun atas inisiatif Bupati Merauke waktu itu, Anwar Ilmar, dan dibantu tokoh-tokoh Islam dikawasan paling timur Indonesia tersebut didirikanlah Yayasan Pendidikan Islam (YPI). Lihat Pelajaran Ukhuwah dari Indonesia Timur, http:// www.oocities.org/ injusticedpeople/PelajaranUkhu wahdariIndonesiaTimur.htm akses 29 okt 2014.

Di Papua, dahulu lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah daerah hanya 3 yaitu; YPK untuk pendidikan Kristen Protestan, YPPPK untuk pendidikan Kristen Katholik dan YAPIS untuk pendidikan Islam. Jadi setiap lembaga Islam yang ingin diakui dan ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah harus bergabung dalam satu lembaga yaitu YAPIS. Saat ini, payung YAPIS tidak lagi satu-satunya payung yang mewakili pendidikan Islam, karena saat ini telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam lain. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Papua (http://sejarah. kompasiana. com/2013 /05/30 / sejarah-perkembangan-pendidikan-Islam -dipapua-560472. html akses 31 Agustus 2014).

Keberadaan YAPIS ini bukan saja mendapat respon positif dari kalangan Muslim, tapi juga orang tua non-Muslim. Banyak dari mereka yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini dengan alasan bervariasi antara lain: disiplin yang tinggi dan melarang murid untuk mabuk-mabukkan, sementara mabuk merupakan budaya sebagian masyarakat yang masih terasa sulit dihilangkan. Saat ini kedudukan YAPIS di mata masyarakat Papua hampir sama sejajar dengan Lembaga Pendidikan Kristen Kristus Raja. Ada ratusan sekolah di bawah naungan YAPIS dan dua Perguruan Tinggi (STIE dan STAIS) yang bernaung di bawah bendera YAPIS.

Saat ini YAPIS memiliki 19 cabang di Papua. YAPIS membuka lembaga pendidikan dari SD hingga ke Perguruan Tinggi. Saat ini telah memiliki 179 unit sekolah dan 80 sekolah mitra. Satu hal yang menggembirakan, dan harusnya menjadi panutan seluruh muslim di Indonesia yakni di sini di bidang penyelenggaraan pendidikan ada pemandangan menyejukkan dengan "bersatunya" dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah di dalam sebuah lembaga penyelenggara pendidikan. Kedua ormas yang di luar tempat ini (Papua) kerap ribut, di sini mereka bergerak bersama. Masing-masing organisasi besar ini tetap mempunyai lembaga pendidikan masing-masing, namun semua lembaga pendidikan itu bersama-sama berkoordinasi di bawah payung YAPIS.

Organisasi Penyelenggara Pendidikan Madrasah

Kehadiran organisasi Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) di Papua menjadi angin yang menggerakkan perkembangan madrasah Papua. Organisasi YAPIS ini bisa dianggap sebagai organisasi jaringan pendidikan Islam yang asli Papua, sebagaimana keberadaan Nahdlatul Ulama (Jawa Timur), Muhammadiyah (Yogyakarta), Matlaul Anwar (Banten), Al Wasliyah (Sumatera Utara), Nahdlatul Wathan (Lombok NTB), Darud Dakwah Wal Irsyad (Sulawesi Selatan), Al Khairat (Sulawesi tengah). Memang YAPIS ini nantinya tidak hanya mengerakkan madrasah di Papua, tetapi juga pendidikan Islam lainnya.

Kehadiran organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang awalnya lebih didorong oleh perorangan yang terpaksa datang ke daerah itu akhirnya turut merintis hadirnya madrasah di daerah itu. Tercatat orang simpatisan Muhammadiyah justru pertama kali memperkenalkan madrasah di Papua. Tepatnya di wilayah Merauke Pada tahun 1929 Tengku Bujang Selamat, seorang duta muhammadiyah di merauke, mendirikan madrasah pertama kali di Merauke yang berlokasi di Jalan Wilis (Saat ini berada di ujung landasan bandara Mopah Merauke). Perkembangan madrasah di Papua tidak terlepas dari kehadiran beberapa elemen masyarakat yang sempat hadir di Papua, seperti keberadaan transmigran, pegawai negeri dari berbagai posisi di pemerintah daerah, organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, serta yayasan lokal seperti Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS), Yayasan pendidikan Karya pembangunan (YPKP), termasuk pesantren Hidayatullah dan Dewan Dakwah Wal irsyad (DDI) (Toni Viktor M Wanggai, 2009).

Gerakan Muhammadiyah hadir di Papua pertama kali adalah di Merauke pada tahun 1926 dibawa oleh Tengku Bujang Selamat. Pada tahun 1929 Tengku Bujang Selamat mendirikan madrasah pertama kali di Merauke yang berlokasi di Jalan Wilis (Saat ini berada di ujung landasan bandara Mopah Merauke). Namun pada saat itu, Muhammadiyah belum secara resmi membuka cabang di tanah Papua. Cabang Muhammadiyah baru terwujud secara resmi pertama kali pada tahun 1966 di Abepura. Tengku Bujang Selamat di Merauke memperkenalkan beberapa tradisi keagamaan yang dimiliki muhammadiyah seperti Sholat Hari raya di lapangan, penetapan tanggal Hijrah berdasarkan hisab. Kehadiran Muhammadiyah di Papua ini puncaknya berhasil mengajak Ibrahim bauw, raja rumbati, menjadi Pengurus Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama hadir di Papua dimulai di Fak-Fak. Melalui gerakan pemuda Anshor, NU masuk ke Papua (1965-1967) yang saat itu dirintis oleh Abdullah Killian dan Syarifuddin Rumoning. Jaringan Anshor di Papua segera membesar dengan dibangunnnya masjid Jami' di Jayapura. Masjid ini selanjutnya dijadikan sentra pengembangan NU di Papua, termasuk didalamnya membuka pintu untuk pendirian Madrasah Maarif di tanah Papua. Tercatat lembaga madrasah yang menggunakan kata "maarif" (lembaga pendidikan NU) ada 11 lembaga, yaitu 7 madrasah ibtidaiay, 3 madrasah tsanawiyah dan 1 madrasah aliyah. Jumlah terbanyak ada di daerah Sorong.

Di Papua, YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) ini merupakan payung supaya pendidikan Islam diakui oleh pemerintah. Di Papua, dahulu lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah daerah hanya 3 yaitu; YPK untuk pendidikan Kristen Protestan, YPPPK untuk pendidikan Kristen Katholik dan YAPIS untuk pendidikan Islam. Jadi setiap lembaga Islam yang ingin diakui dan ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah harus bergabung dalam satu lembaga yaitu YAPIS. Saat ini, payung YAPIS tidak lagi satu-satunya payung yang mewakili pendidikan Islam, karena saat ini telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam lain. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Papua (http://sejarah. kompasiana. com/2013 /05/30 /sejarah-perkembangan-pendidikan-Islam -di-papua-560472. html akses 31 Agustus 2014).

Yayasan Pondok Karya pembangunan (YPKP) berdiri pada tanggal 20 desember 1975. Didirikan Sudjadi notosemino, seorang petugas sukarelawan guru trikora yang datang ke Papua pada tahun 1963. Yayasan ini berlokasi di Sentani Kota, Sentani, Jayapura. Dahulu YPKP ini berafiliasi pada partai Golongan Karya dan bernaung dibawah GUPPI. YKPK ini menyelenggarakan pendidikan mulai dari MI, MTs, dan MA.

Hidayatullah di Papua memang tergolong baru. Hidayatullah mulai masuk Irian pada tahun 1989 yang saat itu diawali oleh almarhum Ustadz Amin Bahrun dan Ustadz Abdul Majid Aziz. Amin Bahrun langsung bertugas dakwah di kawasan tempat pertamakalinya injil masuk di Irian, yakni di Manokwari. Sementara Abdul Majid Aziz dengan peluh keringat membabat hutan di daerah bernama Makbusun yang saat ini menjadi lokasi Hidayatullah Cabang Sorong. Pada tahun 1992 Hidayatullah mulai menseriusi pengiriman dan perintisan Hidayatullah di Provinsi Papua. Dakwah terus

bergeliat dan program sosial pun terus digalakkan. Hidayatullah langsung mendirikan kampus hampir di setiap Kabupaten di Provinsi Papua. Saat ini dari 29 kabupaten yang ada di Provini Papua dan Papua Barat, Hidayatullah berada di Sorong, Manokwari, Biak, Fak-Fak, Serui, Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Kaimana, Timika, ditambah Teluk Bintuni, Raja Ampat dan perintisan di Asmat, Enarotali dan Sarmi. (http://www.hidayatullah-papuabarat. com/p/sejarah-singkat.html. akses 17/9/2014).

Organisasi yang lain adalah Darud Da'wak wal irsyad (DDI) yang berpusat di Sulawesi selatan. Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Kota Jayapura berlokasi Jalan beringin Entrop Kota jayapura. Pondok ini Mulai berdiri tahun 1991 dengan membuka Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan setelah penamatan tahun ke 3 pada 1994 maka langsung dibuka Madrasah Aliyah. Hingga saat ini sudah 16 tahun berkiprah di Bumi Cenderawasih Papua (Irian Jaya) ikut serta menyukseskan Pendidikan.

Dari total kabupaten/kota di Papua, madrasah berhasil berkembang di 18 kabupaten/kota di Provinsi Papua sudah ada madrasahnya. Sekitar 11 kabupate/kota yang belum ada perintis atau penggagasnya. Jumlah ini sifatnya relatif, karena ada kemungkinan embrio madrasah sudah ada, namun belum tercatat dalam data kemenag 2010 atau madrasah yang masih merupakan kelas jauh dari madrasah yang ada didekatnya.

Dinamika Madrasah di beberapa kawasan Papua

Untuk memudahkan kajian ini berdasarkan geografi Papua, di sini secara garis besar Papua dibagi dalam empat kawasan kajian. Pembagian ini didasarkan pada geografi dan kelompok gugusan madrasah yang ada di bumi Papua. Keempat kawasan itu meliputi Papua barat (meliputi wilayah Provinsi Papua Saat ini), Papua Utara (sekitar jayapura, Keerom, Sarmi), dan Papua selatan (sekitar merauke) dan Papua Tengah (meliputi Puncak Jaya, nabire, Mimika, Biak numfor dan sekitarnya). Sebagai bahan pertimbangan pengelompokkan kawasan ini juga didasarkan pada gagasan-gagasan pemekaran wilayah yang terdapat di media internet. Baca Bagus Cahyono. Wacana Pemekaran Maluku dan Papua 9 Provinsi (Desartada RI 70 provinsi). (http://regional.kompasiana.com/2014/04/13/ wacana-maluku-papua-dan-nusa tenggara-16provinsi-konteks-indonesia-80-provinsi-645255. html akses 30 Oktober 2014).

a. Kawasan Papua Barat

Kawasan Papua barat secara umum meliputi kawasan Provinsi Papua baraat Saat ini. Provinsi ini secara de facto meliputi Kabupaten-kabupaten Fakfak Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Kota Sorong. Namun untuk kajian ini hanya akan dipetakan secara umum.

Dahulu saat zaman kolonial, Pendidikan di seluruh Irian Jaya pada masa penjajahan itu diserahkan seluruhnya kepada Zending dan Misi yang diatur dengan Lagere Onderwijs Subsidie Ordonantie (LOSO) untuk tingkat pendidikan dasar dan Melderbaar Onderwijs Ordonantie (MOSO) untuk sekolah tingkat lanjutan. Pada saat itu, semua sekolah diurus oleh yayasan yang didirikan oleh Zending yaitu Yayasan Pesekolahan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili (YPPGI) dan yang didirikan oleh Misi Yayasan Pendidikan Persekolahan Kristen (YPPK) serta yayasan Advent yang didirikan Advent. Ke mana anak-anak Islam sekolah? Tidak ada alternatif lain, selain harus memasuki sekolah Kristen.

Di tengah kegalauan itu, muncul keinginan dari salah seorang putra daerah muslim yang dihormati masyarakat untuk mendirikan sekolah Islam pada tahun 1930. Orang yang dihormati dan disegani itu adalah Raja Rumbati, Ibrahim Bauw, yang kemudian dikenal sebagai salah seorang yang tergolong gigih berdakwah. Setelah mendapat pendidikan keislaman dari seorang muballigh dari Makassar yakni Daeng Umar, Raja Ibrahim Bauw bermaksud mendirikan sekolah Muhammadiyah. Akan tetapi langkah Ibrahim Bauw ini dianggap tindakan subversif oleh Belanda. Ibrahim pun dijebloskan ke penjara selama kurun satu tahun.

Sekeluar dari penjara, semangat dakwah Ibrahim tidak surut. Ia kemudian mendirikan Kesatuan Islam New Guinea (KING). Karena memiliki pengikut yang terus berkembang, organisasi ini belakangan menggugah Pemerintah Belanda yang kemudian mendukung didirikannya Internat Islam di Fakfak. Gedung Internat Islam ini selanjutnya digunakan untuk sekolah guru, kemudian dirubah menjadi Madrasah Aliah Negeri (MAN)—sekarang disini berdiri cabang YAPIS

Dari 13 kabupaten/kota di Papua barat, data kemanag tahun 2010 hanya menyebut 9 Kabupaten /kota yang telah berdiri madrasah di wilayah itu.

Tabel. 1 Jumlah Madrasah Di Papua Barat

	MI	MTs	MA	Jumlah
Fak-Fak	4	4	1	9
Kaimana	1	-	-	1
Sorong	11	9	5	25
Sorong Selatan	1	-	-	1
Raja Ampat	1	1	1	3
Manokwari	4	3	1	8
Teluk Bintuni	2	-	-	2
Teluk Wondama	1	-	-	1
Kota Sorong	6	2	1	9

Sumber: Diolah dari Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010

Dari seluruh daratan Papua, kawasan Papua barat ini menempati urutan tertinggi dari jumlah madrasahnya, yaitu 59 madrasah. Kehadiran madrasah pertama kali di Sorong dapat dilacak pada tahun 1965 ketika kedatangan KH. Uso yang berniat mengembangkan pendidikan agama dan keagamaan di sana. KH Uso memulai dengan dukungan tokoh lokal memulai membuka Pendidikan Islam formal yang pertama yaitu Pendidikan Guru Agama-Pertama (PGA-P) 4 (empat) tahun setara dengan MTs/SMP pada tahun 1965. Pada tahun 1969 PGA-P berubah menjadi PGA 6 (enam) tahun berdasarkan kebijakan dari pusat Jakarta. Pada tahun 1980 PGA berubah sistem menjadi PGA 3 (tiga) tahun dan berubah nama menjadi Sekolah Guru Agama (SGA). Pada tahun 1990 lembaga pendidikan SGA berubah lagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sorong.

Setelah PGA mulai meluluskan murid, maka pada tahun 1970, di Sorong mulai berdiri Madrasah Ibtidaiyah An Nur madrasah swasta pertama di Sorong yang bertempat di Kampung Baru. Pendirian ini juga diprakarsai oleh KH. Uso dan KH. Nur Hasyim Gandhi serta para tokoh agama lainnya termasuk tokoh agama asli Papua. Kemudian pada tahun 1980, mereka mendirikan lagi pendidikan Islam formal yaitu MI Al-Ma'arif. Kedua pendidikan Islam formal itupun sampai sekarang masih eksis bahkan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada jenjang MTs, pada tahun 1980 di Sorong berdiri Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

Dari beberapa organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan yang ada di Papua barat dapat digambarkan sebagai berikut: Muhammadiyah yang mulai masuk ke Papua melalui merauke, di Papua Barat berhasil merekrut salah satu raja lokal berpengaruh yaitu raja Rumbati bernama Ibrahim

Bauw sebagai simpatisan Muhammadiyah. Setelah itu dengan pengaruh yang dimiliki Ibrahim Bauw, Muhammadiyah mulai merintis madrasah di Papua barat. Muhammadiyah saat ini termasuk organisasi yang berhasil membuka madrasah dalam jumlah yang sama yang diraih NY, yaitu berhasil mendirikan 9 madrasah yang terdiri dari 2 MI, 5 MTs dan 2 MA.

NU atau maarif tidak ketinggalan, organisasi yang masuk pertama kali di Papua melalui Fakfak melalui Gerakan Pemuda anshor berhasil mendirikan madrasah di Papua Barat ini sebanyak 9 madrasah, terdiri dari 6 MI, 2 MTs dan 1 MA. YAPIS berhasil mendirikan lembaga pendidikan yang menggunakan YAPIS 4 madrasah, terdiri dari 3 MI dan 1 MTs.

Hidayatullah yang mulai masuk pada tahun 1989, saat itu diawali oleh Abdul Majid Aziz dengan peluh keringat membabat hutan di daerah bernama Makbusun yang saat ini menjadi lokasi Hidayatullah Cabang Sorong. Saat ini di Papua barat Hidayatullah telah bergerak di berbagai tempat seperti Sorong, Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat. Dari data kemenag 2010, nama madrasah yang secara langsung menyebut nama hidayatullah sebagai nama madrasah hanya 1 lokasi (3 lembaga) yaitu di Jl. Supriyadi Makbusun, Mayamuk, yaitu madrasah Integral hidayatullah meliputi MI, MTs dan MA.

Raja Ampat. Sekalipun Raja Ampat adalah termasuk wilayah Papua di wilayah Barat yang pertama-tama menjadi daerah perkembangan Islam di daerah Papua, namun ternyata jumlah madrasah di daerah ini sangatlah sedikit. Disebutkan dalam data Kementerian Agama tahun 2010, di Raja Ampat hanya ada 3 madrasah, itupun terbagi dalam tiga jenjang MI, MTs dan MA. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah terdapat Misool Timur selatan, yaitu MIS Al Maarif. Sedangkan jenjang MTs terdapat di tempat yang sama yaitu MTs Darussalam Misool Timur Selatan dan jenjang MA terdapat MA Muhammadiyah Kalobo, Salut Raja Ampat.

Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua barat. kota ini pula dikenal sebagai pintu awal masuknya Kristen di Papua, yaitu dengan kehadiran dua pendeta Carl William Ottow dan Johan Gottlob Geissler yang tiba di Pulau Mansinam pada tanggal 5 februari 1855. Nama kedua pendeta ini diabadikan namanya menjadi nama Perguruan tinggi di sana. Pulau mansinam menjadi simbol masuknya Kristen di tanah Papua.

Di kota ini ternyata terdapat beberapa madrasah. Ada 4 Madrasah Ibtidaiyah, 3 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah.

Fak-Fak. Daerah berikutnya perkembangan madrasah di Papua Barat adalah Fak-Fak. Sejak tahun 1963, di Fak-fak di kenal tiga macam lembaga penyelenggara sekolah dasar, yakni sekolah dasar negeri, sekolah dasar Kristen, dan sekolah dasar Katholik. Setelah tahun 1963 (yakni setelah masa peralihan kekuasaan Belanda), barulah pendidikan Islam berkembang dengan baik di kabupaten Fakfak dengan lahirnya Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang berkiprah dalam bidang pendidikan. Perkembangan berlangsung dilingkungan pendidika vang masyarakat Islam selain dimungkinkan adanya lembaga pendidikan (YAPIS) yang berdiri pada tahun 1977, maka perkembangan itu juga dimungkinkan oleh adanya sekolah dasar dan menengah yang didirikan oleh Departemen pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Fak-Fak. UMAT Islam Papua DI BAWAH KOLONIALISME BELANDA (http://lengkas. wordpress.com/2012/03/22/umat-Islam-papua- dibawah-kolonialisme-belanda akses 8/9/2014/).

Di Fak-Fak terdapat 4 Madrasah Ibtidaiyah, 4 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah. 1 madrasah berstatus negeri yaitu MIN Fak-Fak, MTsN Fak-Fak dan MAN Fak-Fak.

b. Kawasan Jayapura (Timur Utara)

Kawasan ini penulis maksudkan untuk menyebut daerah yang meliputi Kota jayapura, kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan sekitarnya. Karena jayapura merupakan ibukota provinsi sejak Papua bernama Irian Jaya hingga saat ini bernama Papua, maka perkembangan Islam dan madrasah di sini cukup aktif.

Tabel 2. Jumlah Madrasah Di Papua

	,		1	
	MI	MTs	MA	Jumlah
Jayapura	4	3	3	10
Keerom	4	3	1	8
Kota jayapura	6	9	4	19
Sarmi	-	1	-	1
				38

Sumber: Diolah dari Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010

Setelah Sorong, kawasan kedua yang banyak terdapat madrasah di Papua adalah Jayapura. Sebagai ibukota provinsi, beberapa organisasi keagamaan yang mengelola lembaga pendidikan hadir di kawasan Jayapura ini. Muhammadiyah yang mulai masuk ke Papua sejak tahun 1926 di

Merauke dan Fak-Fak masuk juga di Jayapura. NU yang masuk melalui Fak-Fak pada tahun 1965 hadir juga di Jayapura ini dan bermarkas di Masjid Jami jayapura. Beberapa yayasan pendidikan Islam di jayapura seperti Pendidikan Karya pembangunan (YPKP) tahun 1975, YAPIS (1968), Hidayatullah (1989), Darud da'wah wal Irsyad (1991).

Muhammadiyah, walaupun masuk pertama di Papua, nampaknya perkembangan di Jayapura tidak banyak mengembangkan madrasah. Data kementerian Agama tahun 2010 hanya menyebut madrasah Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah di Abepura Kota Jayapura. Ada kemungkinan Muhammadiyah di Jayapura lebih benyak mengembangkan sekolah umum daripada madrasah. Demikian juga NU di Jayapura, dari beberapa madrasah yang menyebutkan secara eksplisit madrasah Maarif juga hanya satu yaitu MTs Al Ma'arif Abepura.

YPKP telah berkembang sejak 1975 di sentani telah berhasil mengembangkan madrasah dari Jenjang MI hingga ke jenjang MA. Yayasan ini berhasil menyediakan lemabaga pendidikan dari TK, MI, MTs, SMP, MA, SMK, Perguruan Tinggi UNIYAP. Perintis YPKP adalah para pendatang khususnya dari Jawa tengah. Dahulu YPKP ini berafiliasi pada partai golongan karya dan bernaung dibawah GUPPI. YKPI ini menyelenggarakan pendidikan mulai dari

Hidayatullah hadir di Jayapura pada tahun 1989 M, oleh Ustaz KH. Abdurrahman Muhammad (kini Pimpinan Umum Hidayatullah/Ketua Dewan Syuro Hidayatullah). Setahun kemudian tongkat estafet di lanjutkan Ust. H. Suwardani Sukarno tahun 1990-1997. Hidayatullah Jayapura berdiri sejak tahun 1990 dengan akte notaries M Rasjid Umar, SH no. 57, tanggal 17 oktober 1990 merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah, ekonomi dan pengelolaan ZIS. (Nurudin, 2012).

Tahun 1990 yayasan Hidayatullah mendapat tanah hibah dari istri H. Muslimin (alm) seluas 0, 5 ha, tepatnya di kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, saat ini berfungsi sebagai kantor dan Raudhatul Atfal (TK/RA) dan taman pendidikan Al-Quran (TPA) serta gedung sekolah SD. Yayasan ini mengalami kesulitan ketika pemerintah Kota Jayapura terus menggalakan pembangunan, kawasan kelurahan Entrop menjadi pusat pembangunan pertokoan, pasar dan terminal antar kota. Situasi ini sangat tidak mendukung kegiatan Pendidikan Pesantren dijalankan, maka

pencarian lokasi baru kembali dilakukan.

Pada tahun 1992 di Doyo baru Sentani, bapak Maraba menghibahkan tanahnya 0, 5 ha untuk di jadikan kampus pesantren. Di atas tanah inilah aktifitas santri mulai di aktifkan serta pembinaan ummat sekitarnya, di pimpin Ust. Sudiono AR. Akhir tahun 1994, pembangunan kampus pondok pesantren Hidayatullah Jayapura di pindah ke kampus Pesantren holtekamp distrik Muaratami kotamadya Jayapura seluas 2 ha dan tahun 1996 mendapat hibah 2 ha dari Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina wilayah VIII Jayapura plus satu unit bangunan masjid.

Hingga tahun 2011, di atas tanah 6 ha telah dibangun beberapa gedung, antara lain: perumahan guru, gedung pendidikan putra dan gedung pendidikan putri dua lantai, Masjid serta gedung TK. Namun pembangunan kampus terpadu terus diusahakan tutur ketua yayasan seperti; pembangunan asrama putra dan putri yang permanen, rencana pengaspalan jalan keliling kampus dan pagar are serta rencana pembangunan home industry mandiri santri. Adapun sumber dana yayasan pendidikan ini menurut pengelola Nurfatahuddin Amin, diperoleh dari pemerintah dan bantuan kaum Muslimin baik perorangan maupun kelompok/organisasi. Kampus Hidayatullah Jayapura didesain menjadi dua bagian area, dimana seluruh aktivitas belajar, bermain, ibadah, makan, dan tempat tinggal semuanya terpisah antara putra dan putri.

Hadirnya madrasah di Jayapura Papua merupakan bentuk respon sosial terhadap kondisi kemiskinan masyarakat yang berimbas pada terputusnya pendidikan anak bangsa dan tercerabutnya nilai-nilai agama serta moral dari dalam diri anak-anak tersebut. Minimnya lembaga pendidikan Islam akan berdampak pada pendangkalan aqidah khususnya anakanak transmigrasi. Dari sekian banyak madrasah memang masih lebih banyak menampung anakanak pendatang baik yang datang karena berdagang, transmigrasi atau yang dulu ditugaskan sebagai PNS di daerah itu. Masih sedikit anak-anak Papua asli yang tertarik masuk ke madrasah. Barangkali madrasah khusus dengan format tertentu perlu dikembangkan untuk daerah ini.

Kawasan Papua Selatan (Merauke)

Kawasan ketiga yang menjadi urutan selanjutnya setelah Papua barat, Papua Timur Utara (Jayapura) adalah Merauke. Kabupaten ini tidak seperti yang dibayangkan banyak orang

berada diujung selatan Indonesia, ternyata akses transportasi dan masyarakatnya tidak jauh dari suasana di jawa. Kota ini ternyata cukup ramah dan mudah dijangkau dan keadaanya relatif aman dan tidak terlalu sulit untuk mencari makanan halal. Sepintas Merauke seperti kampung di Jawa. Kita tidak merasa suasana berbeda dengan suasana di Jawa. Kabupaten Merauke dihuni oleh 80 % pendatang, dan kebanyakan penduduk adalah orang Jawa. Maklum Merauke adalah daerah sasaran transmigrasi.

Sekalipun Merauke jauh di ujung Indonesia, dari seluruh daratan Papua, justru madrasah pertama kali di daratan Papua yng masih bisa dilihat bukti fisiknya adalah di daerah ini. Sejak Bujang Salim merintis madrasah pada tahun 1929 di Merauke yang berlokasi di Jalan Wilis (Saat ini berada di ujung landasan bandara Mopah Merauke) hingga saat ini madrasah telah berkembang menjadi 17 madrasah.

Selanjutnya penggerak madrasah di Merauke, sama dengan daerah lain digerakkan oleh organisasi keagamaan tingkat nasional seperti NU dan Muhammadiyah, yayasan-yayasan pendidikan seperti YPKP, Hidayatullah, DDI, YAPIS, juga dilakukan oleh perorangan yang hadir ke sana baik itu karena transmigrasi atau tuntutan pekerjaan.

Salah satu transmigran yang menggagas madrasah di Merauke adalah madrasah yang didirikan di dekat tugu Merauke. Tepatnya Di Distrik Sota. Madrasah ini digagas oleh Ibu Fathonah ini merupakan sosok penting dalam pengembangan pendidikan madrasah di daerah Sota Merauke. Ibu Fathonah kelahiran Jember, 1958. Menikah dengan Bapak Sulaiman kelahiran Sumenep 1949. Menikah tahun 1981 dan tinggal di Balong, Jember, Jawa Timur. Tahun 1995 ibu Fathonah dan keluarga memutuskan bertransmigrasi karena ingin merubah nasib. Waktu berangkat ke Merauke, ibu Fathonah sudah berputera 5 anak, anak bertambah satu lagi selama di Sota Merauke. Total semua anak enam, semuanya laki-laki.

Ibu Fathonah lulusan dari sekolah PGAN (lulus 1977) di Balong Jember. Peran penting ibu Fathonah selain menjadi pimpinan majelis taklim Muslimat Distrik Sota. Dia juga pendiri PAUD Al Firdaus dan Kepala MI Al Maarif Sota. Ibu Fathonah juga mengajar agama di SMP negeri 11 Sota Merauke. Terpanggil minimnya pelajaran agama untuk anak-anak, ibu Fathonah juga mengajarkan les bimbingan agama di rumahnya, yaitu dengan membuka Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) di rumahnya setiap

sore hari. Berkali-kali dalam wawancara kami, ibu fathonah mengeluhkan tentang pelajaran agama pada anak-anak Sota. Dia nampak merasa sendirian dalam mencoba memberikan pelajaran agama semaksimal mungkin pada anak-anak. Dia juga merasa prihatin masih rendahnya kemampuan baca al Qur'an pada siswa SMP negeri Sota. Mereka kemampuan bacanya masih dibawah kemampuan anakanak madrasah yang dipimpinnya. Dia juga memprihatinakn bagaimana pembelajaran agama di Sota ke depan. Di Sota sangat sedikit orang yang bisa mengajarkan agama, bahkan kalo dibilang tidak ada. Sementara untuk mengandalkan anak-anak yang belajar ke Kota untuk kembali ke Sota, kemungkinan itu sangat kecil, karena tidak mustahil anakanak Sota sekarang yang belajar ke pesantren di Kota nantinya tidak mau kembali ke Sota. Terpanggil oleh semua keadaan keagamaan di Sota ini, Ibu Fathonah mewakafkan sebagian tanahnya untuk kepentingan agama. Dia sedang mengurus sertifikasi tanah wakaf sebanyak 2500 m2. Tanah ini nantinya disediakan untuk pembangunan madrasah.

Pendirian madrasah di Sota bukan tanpa masalah, ada beberapa pihak yang sebenarnya masih keberatan dengan kehadiran madrasah ini. Terutama pihak SD Yayasan Pendidikan Kristem (YPK) yang sebelumnya adalah satu-satunya SD di distrik Sota. Pendorong didirikannya MI As Sunah Al Maarif adalah untuk mewadahi pendidikan untuk anak Islam. Karena di SD YPK layanan pendidikan agama terbatas, yaitu hanya disediakan guru agama Kristen, sementara untuk siswa Muslim dan Katholik tidak desediakan guru khusus yang seagama dengan mereka. Konon, dulu pernah dikirimkan guru agama Islam, tetapi tidak diterima oleh pihak yayasan. Prihatin atas pendidikan agama yang kurang terlayani, serta adanya sinyalemen bahwa anak lulusan al Firdaus tidak diterima di SD YPK, maka Ibu Fathonah dan kawan-kawan menggagas pendirian pendidikan Madrasah. Langkah pertama yang dilakukan ibu Fathonah adalah mencari lembaga pendidikan madrasah yang ada di kota Merauke. Maka ketemulah Madrasah Ibtidayah Al Maarif. Ibu Fathonah memposisikan diri membuka kelas jauh dari MI Al Maarif.

Saat ini jumlah madrasah di kawasan Merauke berjumlah sekitar 17 madrasah. Data tahun 2010 kementerian agama menyebutkan bahwa di Merauke terdapat 6 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Madrasah Tsanawiyah, dan 5 Madrasah Aliyah. Hanya ada satu madrasah yang berstatus negeri yaitu Madrasah Ibtidaiyah negeri Kumbe, Distrik Kurik, Merauke.

Para penggerak madrasah di Merauke terdiri dari beberapa unsur seperti organisasi keagamaan Muhammadiyah, pejabat pemerintah dan para transmigran. Muhammadiyah pada tahun 1926 secara kebetulan denga diungsikannya Tengku Bujang Selamat ke Merauke telah merintis pendidikan muhammadiyah di sana. Nahdlatul Ulama melalui Maarid di Merauke ini mengembangkan 1 madrasah di Jl. Gak Bambu Pemali. Madrasah ini memiliki siswa kurang lebih 500 siswa. Jumlah yang cukup besar untuk lembaga pendidikan di wilayah merauke. Darud Da'wah Wal irsyad (DDI) mengembangkan madrasah di Jl. Menara Lampu Satu Merauke meliputi 1 jenjang Madrasah ibtidaiyah, 1 jenjang Tsanawiyah dan 1 Jenjang Aliyah.

d. Kawasan Papua Tengah

Kawasan ini digunakan untuk menyebut daerah yang berada di Papua bagian Tengah yang tidak termasuk Papua barat, jayapura dan Merauke. Walaupun tidak sama persis, karena konon Puncak Jayawijaya juga diusulkan menjadi Provinsi sendiri. Untuk sementara, gampangnya kategori ini untuk menyebut daerah Papua yang tidak masuk dalam 3 kawan lainnya. Untuk sementara, masuk dalam pengelompokkan ini antara lain daerah puncak jayawijaya, Timika, Nabire, Biak numfor dan yapen Waropen.

Untuk jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) di kawasan ini terdapat 10 madrasah yang terdiri dari 1 Madrasah di Puncak Jayawijaya, 4 madrasah di Nabire, 2 di Mimika, 2 madrasah di yapen Waropen, 1 madrasah di Biak Numfor. Sedangkan pada jenjang SMP/Tsanawiyah, terdapat 5 madrasah (2 di nabire, 1 di Biak Numfor, 1 di Yapen Waropen, dan 1 di Mimika). Pada jenjang SMA/Aliyah, terdapat hanya ada 2 di nabire.

Tabel 3. Jumlah Madrasah Di Papua Tengah

raber 5. Jannari Maaraban Bi Fapaa Tengan				
Kabupaten/Kota	MI	MTs	MA	Jumlah
Nabire	4	2	2	8
Mimika	2	1	-	3
Yapen Waropen	2	1	-	3
Biak Numfor	1	-	-	1
Puncak jayawijaya	1	-	-	3
Jumlah				18

Sumber: Diolah dari Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010

Dari daerah-daerah kabupaten dan Kota di kawasan Papua tengah ini, Nabire merupakan daerah yang istimewa karena memiliki madrasah 3 jenjang sekaligus (MI, MTs dan MA). Hanya Nabire yang telah menyelenggarakan pendidikan madrasah 3 jenjang. Secara jumlah madrasah, nabire menempati posisi ke tujuh bersama-sama dengan daerah kabupaten/kota Manokwari dan Keerom. Urutan dari kabupaten/kota yang memiliki lembaga madrasah terbanyak adalah Sorong, Kota Jayapura, Merauke, Jayapura, Kota Sorong, Nabire, Manokwari, Kerom dan Raja Ampat (lihat Tabel di bagian pembahasan).

Di daerah puncak jaya wijaya terdapat madrasah yang didirikan putra Papua asli, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso. Merasugun Asso adalah orang pertama dari lembah Baliem yang masuk Islam (Muh. As'ad, dkk. 2013) yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama Madrasah (Toni Viktor M. Wanggai, 2009). Awalmya merasugun asso adalah pembangunan Islamic Center. Merasugun Asso membayangkan kontruksi bangunan sebagaimana model Pondok Pesantren yang ada di Jawa. Dalam konsep Islamic center itu terdiri selain masjid terdapat lembaga pendidikan. Namun karena jarak Wamena ke Walesi berjarak sekitar 6 Km dan ada kesulitan membawa bahan bangunan ke lokasi, maka langkah pertama yang dilakukan dalam rangka pewujudan Islamic center itu adalah pembangunan jalan wamena-walesi. Sebelum Mimpi Merasugun Asso ini akhirnya bisa terwujud, Merasugun Asso keburu meninggal dunia. Dan cita-cita itu selanjutnya diteruskan oleh pemeluk Islam di walesi lainnya dan terwujud pada tahun 1982. Sebagai bentuk pernghormatan kepada Merasugun Asso, maka Madrasah Ibtidaiyah di tempat itu dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Merasugun Asso.

Permasalahan dan Peluang Madrasah di Papua

Hukum adat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Saking tingginya, hukum adat seakan tidak terkalahkan bahkan oleh hukum negara atau hukum agama. Ini pula yang menyebabkan Papua dalam benak penulis agak blunder terkait dengan pembangunan di daerah ini. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan, ada kesan bahwa dalam beberapa hal masyarakat adat masih memegang peranan penting dan dominan dalam masalah penggunaan sebuah lokasi. Setiap pembebasan tanah harus dikuti ganti rugi dengan pemimpin adat. Sekalipun secara administrasi negara sebuah tanah sudah bersertifikat, namun kalau belum diikuti pembayaran adat, maka seseorang belum bebas menggunakan tanah yang dibelinya. Bahkan dalam beberapa hal, dalam pembangunan prasarana tertentu yang diinisiasi pemerintah terkadang masih terkendala adanya pihak adat yang masih mempermasalahkan status tanah. Beberapa rencana pemerintah membangun fasilitas umumu seperti rencana pembangunan pasar, rumah sakit bisa gagal karena urusan tanah tidak kunjung selesai. Di tanah Papua, masih terdapat ketentuan yang setiap persoalan pemilikan dan penggunaan tanah harus diikuti penyelesaian adat.

PEMBAHASAN

Ada kesan, seakan-akan Papua adalah wilayah yang terbelakang, warganya serba susah diatur, belum lagi adanya klaim-klaim sepihak tentang Papua ini milik agama tertentu. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, karena hal itu akan merugikan sendiri bagi warga Papua. Papua menjadi susah berubah, susah maju, dan selalu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memainkan kepentingannya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya.

Terkait dengan isu keagamaan, misalnya keinginan sekelompok orang vang mengesankan bahwa Papua sebagai daerah injil juga sebenarnya dalam beberapa hal akan membatasi diri bagi warga Papua. Suasana serba tertutup atau adanya gap antar kelompok sosial baik itu atas nama penduduk pribumi vs pendatang, maupun atas nama agama. Dalam komunikasi sosial hal itu akan menyebabkan masyarakat Papua tidak segera dewasa dalam menerima perbedaan. Tulisan mengenai madrasah di Papua ini juga dimaksudkan untuk mengetahui fakta lain dari Papua yang konon banyak dibangun asumsi sebagai daerah non muslim.

Pembangunan atas nama negara di bumi Papua memang tidak mudah, apalagi berhadapan dengan suku-suku asli Papua yang memegang tinggi hukum adat melebihi tata hukum pemerintahan dan hukum agama. Bagi negara, berhadapan dengan kebiasaan adat yang dikuasai elit adat juga sering mengalami kesulitan. Misalnya ketika pemerintah ingin membangun sebuah fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan dan sebagainya selain harus membeli secara perorangan kepada pemilik lahan, negara juga harus melakukan pembayaran untuk pelepasan adat. Belum lagi sering ada klaim lagi dari perorangan, walaupun sudah dilakukan pembayaran pelepasan adat. Hal ini membuat pembangunan di Papua sering buntu.

Demikian juga dalam menghadapi umat beragama lain. Islam di Papua sering dianggap agama pendatang, Islam yang mengharamkan babi, madrasah sebagai lembaga pendidikan menjadi tema-tema yang berat untuk dikenalkan kepada masyarakat asli Papua. Ini juga isu-isu yang secara sengaja dipelihara untuk tidak mengatakan didiamkan yang masih menguntunkan pihak-pihak tertentu di Papua.

Khusus terkait dengan madrasah, ada fakta lain yang menyatakan bahwa kehadiran madrasah di Papua lebih banyak disebabkan usaha umat Islam atau pendatang yang ingin menyediakan layanan pendidikan Islam untuk anak-anak mereka sendiri. Hal itu dilakukan, karena tidak ada layanan keagamaan sesuai agama siswa yang disediakan sekolah-sekolah umum di Papua.

Contoh madrasah di Distrik Sota merauke menunjukkan kenyataan itu. Karena di daerah itu hanya ada satu Sekolah dasar (SD) milik yayasan Pendidikan katholik, dan sekolah itu tidak menyediakan guru agama Islam, maka umat Islam yang ada disitu merasa perlu mendirikan madrasah. Pilihan mendirikan madrasah disitupun bukan tanpa pertimbangan untuk menjaga perasaan non muslim. Mereka memilih madrasah karena kalau mereka ingin mendirikan SD umum, maka mereka akan menyaingi keberadaan lembaga pendidikan yang sudah ada (M. Murtadho, 2012).

Hingga saat ini, perkembangan madrasah di Papua walaupun lamban tetapi menunjukkan gejala peningkatan. Ada 10 daerah kabupaten/kota yang memiliki madrasah 3 jenjang (MI, MTs dan MA). Data selengkapnya lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Peringkat 10 Daerah kabupaten/Kota di Daratan Papua Yang memiliki Madrasah 3 jenjang (MI, MTs,

1 0	MA))	, o .	
Daerah	MI	MTs	MA	Jumlah
Sorong	11	9	5	25
Kota jayapura	6	9	4	19
Merauke	6	6	5	17
Jayapura	4	3	3	10
Kota Sorong	6	2	1	9
Fak-Fak	4	4	1	9
Manokwari	4	3	1	8
Keerom	4	3	1	8
Nabire	4	2	2	8

Sumber: Diolah dari Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010

Kehadiran madrasah di Walesi yang didirikan oleh Merasugun Asso adalah contoh kehadiran madrasah yang simpatik. Merasugun tertarik kepada Islam bukan karena diajak masuk Islam, tetapi ketertarikan Merasugun sendiri ketika melihat kebaikan seorang muslim yang membuatnya terkesan terhadap Islam. Keislaman Merasugun asso juga menarik simpati pimpinan adat berpengaruh Aipon Asso. Hal itu memudahkan merasugun Asso dalam mendirikan madrasah di lembah Baliem Wamena jayawijaya.

Alternatif agar madrasah bisa diterima masyarakat lokal Papua adalah perlunya madrasah membuka diri untuk mereka. Salah satunya madrasah harus siap menerima siswa non muslim. Implikasinya madrasah harus menyiapkan guru agama sesuai dengan siswa yang ada. Sejauh ini pendekatan madrasah jenis ini belum pernah dicoba. Ke depan, tidak ada salahnya model seperti ini diujicobakan untuk lebih mengenalkan dan menunjukkan tingkat partisipasi madrasah dalam mengembangkan pendidikan pada masyarakat lokal.

Di samping itu, pendekatan kultural perlu lebih dikedepankan dalam mengenalkan madrasah di Papua. Pendekatan itu penting sebagaimana proses pengenalan Islam di jawa. Sementara kalau kita saksikan Islam di Papua saat ini lebih banyak diwarnai pendekatan formal yang menyebabkan komunikasi terkesan lebih berjarak seperti tema tentang keharaman babi, muslim yang identik dengan hijab. Umat Islam harus hadir dalam komunikasi-komunikasi budaya yang lebih lentur untuk mengenalkan Islam sebagai agama yang tidak mengancam eksistensi mereka, tetapi sebagai agama damai yang selalu ingin damai untuk menjalankan fungsi rahmatan lil alamin.

PENUTUP

Dari kajian ini bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu; Pertama, jejak-jejak awal sejarah madrasah di Papua menunjukkan bahwa kehadiran madrasah di Papua sudah ada sejak awal abad 19. Namun keberadaan madrasah secara kelembagaan hampir beriringan dengan kehadiran madrasah di daerah lain di Indonesia timur seperti Bima (NTB) yaitu sekitar tahun 1929. Hanya saja jejak-jejak awal di madrasah di Papua itu hanya muncul kemudian hilang lagi. Hal itu disebabkan karena dukungan sumber daya yang sangat terbatas, sehingga kelangsungan madrasah seusia penggagasnya. Madrasah baru berkembang secara sistematis sejak kehadiran Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) yang berdiri tahun 1968, karena yayasan ini menaungi semua yayasan/organisasi penyelenggara madrasah termasuk NU dan Muhammadiyah.

Kedua, pelaku atau penyelenggara madrasah dilakukan oleh banyak pihak baik dipelopori oleh perorangan atau organisasi. Mereka adalah para pendatang yang kebetulan hadir ke Papua karena tugas, berdagang dan transmigrasi. Sejak tahun 1978 madrasah juga mulai digagas oleh penduduk lokal seperti madrasah yang digagas Merasugun Asso di lembah walesi Wamena Puncak jaya. Beberapa organisasi yang bergerak di Papua meliputi YAPIS, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Yayasan pendidikan karya pembangunan (YPKP), Hidayatullah, Darud Dakwah wal Irsyad (DDI).

Ketiga, tantangan yang sering dihadapi madrasah di Papua adalah tuduhan madrasah sebagai usaha Islamisasi. Padahal di lapangan, madrasah didirikan lebih banyak karena para pendatang yang kebetulan muslim ingin memberikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka melalui lembaga pendidikan madrasah. Namun dengan dasar UU Sisdiknas No. 2003 sesungguhnya madrasah bisa mengambil usaha untuk lebih diterima masyarakat Papua yaitu dengan cara madrasah menerima siswa yang non Islam, dengan tentu saja madrasah menyediakan guru agama sesuai dengan agama siswa.

Penelitian ini merekomendasikan madrasah bisa lebih diterima oleh masyarakat Papua adalah madrasah perlu membuka diri membuka layanan pendidikan warga Papua yang bukan muslim. Mengingat pendidikan adalah kebutuhan universal manusia. Namun begitu madrasah berkewajiban menyediakan guru agama sesuai dengan agama siswa. Rekomendasi lain, adalah perlu kementerian agama memberikan perhatian madrasah di Papua dengan pengiriman guru yang berkualitas baik guru umum dan guru agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Papua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya tulisan ini, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data terkait dengan tema yang kami kaji. Pihakpihak yang saya maksud adalah para informan di lapangan, para peneliti di lingkungan badan litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dari Lapangan saya ucapkan terima kasih pada Ibu Nurjanah (Kasi Mapenda Kemenag Kab Merauke), Ibu Fathonah (Kepala MI Al Maarif Sota Merauke), Bapak Teguh (informan di jayapura), Pak Uceng (informan di Sorong). Terima kasih juga kepada para peneliti di lingkungan Kemenag yang telah melakukan penelitian yang data dan laporannya kami kutip untuk tulisan ini seperti Nurudin (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan), Muh As'ad (Peneliti Balai Litbang Makassar).

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Muh., dkk. 2013. Biografi Tokoh Agama di Kawasan Timur Indonesia. Makasar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010. Jakarta: Kementerian Agama RI (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam).
- http://masjidq. blogspot. com/2009/04/sejarahmasuknya-Islam -di-Jayapura. html akses 31 Agustus 2014
- Pelajaran Ukhuwah dari Indonesia Timur, http:// www.oocities.org/ injusticedpeople/ PelajaranUkhuwahdariIndonesiaTimur.htm akses 29)kt 2014
- Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Papua

- http://sejarah. kompasiana. com/2013 /05/30 /sejarah-perkembangan-pendidikan-Islamdi-papua-560472. html akses 31 Agustus 2014
- Murtadho, M. 2012. "Izakod Bekai Izakod Kai: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Ujung Merauke (Distrik Sota Kab. Merauke)" dalam Penelitian Pendidikan Agama dan Keagaman di Perbatasan negara. Jakarta: Puslitbang Pendidikan agama dan keagamaan.
- Layanan dan Kerukunan Agama di Perbatasan Negara; studi Kasus di Distrik sota Merauke." Harmoni, Volume 13 No. 2 Mei-Agustus 2014
- Toni Viktor M. Wanggai. 2009. Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI
- Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Papua http://sejarah. kompasiana. com/2013 /05/30 /sejarah-perkembangan-pendidikan-Islam -di-papua-560472. html akses 31 Agustus 2014
- http://www.hidayatullah-papuabarat.com/p/ sejarah-singkat.html. akses 17/9/2014
- Umat Islam Papua Di Bawah Kolonialisme Belanda http://lengkas. wordpress.com/2012/03/22/ umat-Islam-papua-dibawah-kolonia-lismebelanda akses 8/9/2014